



RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BEKASI**

TAHUN 2027

**PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Capaian IKU dan IKK Tahun 2025	10
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	19
2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027	50
2.4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD	53
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	55
2.7. Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	71
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	75
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	75
3.2. Arah Kebijakan	77
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	84
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	102
5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	109
BAB V PENUTUP	112
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian IKU Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025	10
Tabel 2.2. Capaian IKK Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025	16
Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026	20
Tabel 2.4. Pemetaan Permasalahan pada Bapperida Kota Bekasi	50
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027	55
Tabel 2.6. Review terhadap Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027	56
Tabel 2.7. Uraian Inovasi pada Bapperida Kota Bekasi	71
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator, dan Target Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2027	75
Tabel 3.2. Identifikasi Risiko pada Bapperida Kota Bekasi	76
Tabel 3.3. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Kota Bekasi Tahun 2027	77
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028	85
Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027	102
Tabel 5.2. Formulasi Perhitungan IKU Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027	103
Tabel 5.3. Realisasi IKU Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025	108
Tabel 5.4. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027	109
Tabel 5.5. Realisasi IKK Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD 2
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Gambar 3.1. Jumlah Aparatur Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025 81

Gambar 3.2. Jumlah Aparatur Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025 82
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 3.3. Jumlah Aparatur Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025 82
Berdasarkan Bidang/ Unit Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan fondasi utama penentu keberhasilan, karena berfungsi sebagai peta jalan yang memastikan setiap tindakan dan penggunaan sumber daya menjadi efektif, terarah, serta tepat sasaran. Pentingnya perencanaan pembangunan telah diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

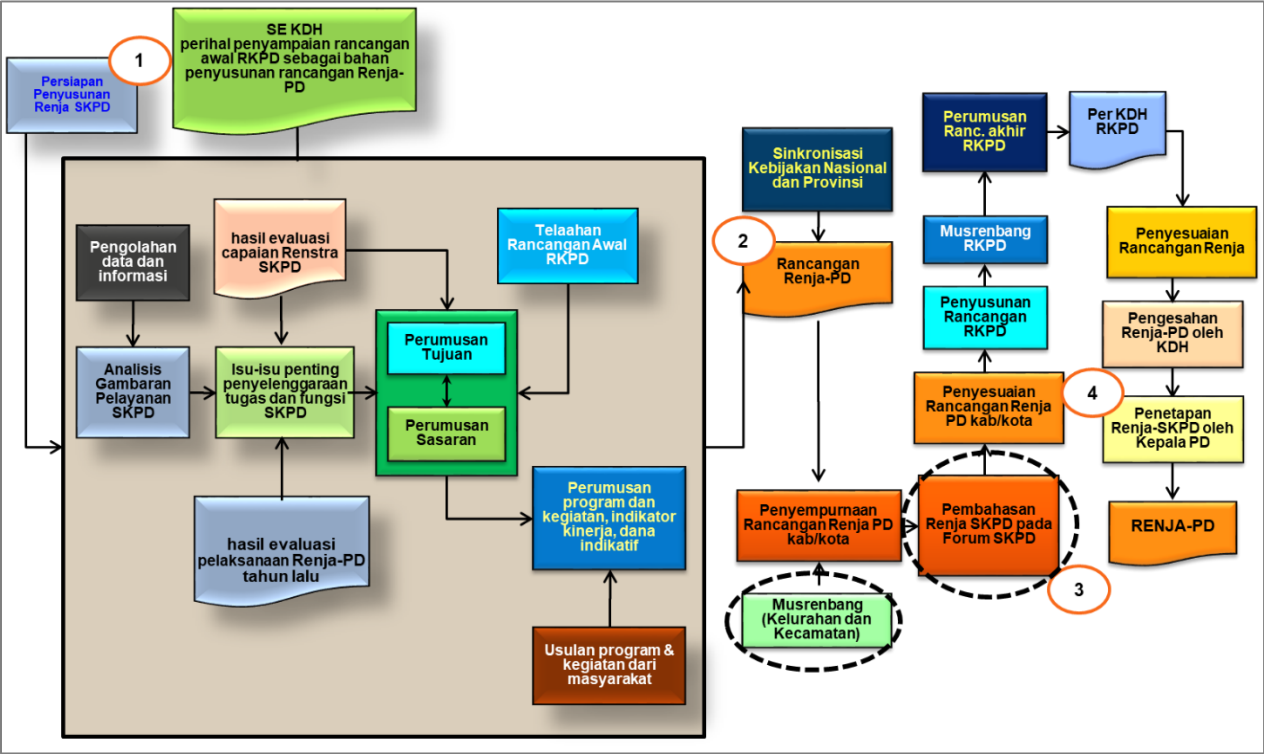
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan.

Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi menyusun Renja Tahun 2027 dengan mempedomani Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2027.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja.

Dalam penyusunan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2026 dilakukan penelaahan Renstra/Renja Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang memiliki tugas utama penyusunan perencanaan pembangunan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu, dilakukan penelaahan juga terhadap Renstra/Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Barat serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Renstra/Renja Bappeda/Bapperida/ Bapperida wilayah kab/kota sekitar Kota Bekasi, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang.

Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 17);
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Bapperida Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2027.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Memberikan gambaran kemampuan Bapperida dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).

3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;

2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, melalui penilaian realisasi dari target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut adalah hasil evaluasi capaian kinerja IKU dan IKK Tahun 2025 pada Bapperida Kota Bekasi.

2.1. Evaluasi Capaian IKU dan IKK Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025 Perubahan, Bapperida Kota Bekasi memiliki 2 (dua) sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan; dan (2) Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja ketiga IKU Bapperida tersebut pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Capaian IKU Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2025			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	22,46	22,28	99,19%	Target tahun 2025 adalah sebesar 22,46, sementara realisasi mencapai 22,8, maka tingkat capaiannya sebesar 99,19%
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	20,70	20,55	99,27%	Target tahun 2025 adalah sebesar 20,70, sementara realisasi mencapai 20,55, maka tingkat capaiannya sebesar 99,27%

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2025			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam BMendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	81,00	94,43	116,58%	Target tahun 2025 adalah sebesar 81, sementara realisasi mencapai 94,43, maka tingkat capaiannya sebesar 116,58%.

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Perubahan Bapperida Kota Bekasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas dapat diuraikan penjelasan dan analisisnya sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 22,28 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 22,46. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,19%.

Faktor belum tercapainya indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB adalah:

- a. Keberadaan dokumen perencanaan kinerja telah tersedia (bobot sebesar 6), namun perumusan sasaran belum sepenuhnya menggambarkan dampak, Bapperida memastikan adanya benang merah mulai dari RPJMD hingga Perjanjian Kinerja. Sasaran yang sebelumnya bersifat normatif akan dipertajam menjadi sasaran strategis yang berorientasi pada hasil nyata (*Impactful Planning*). Sasaran strategis terkadang masih bersifat umum atau normatif, sehingga sulit diukur kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah. Di samping itu, melalui tingkat digitalisasi yang mendukung efisiensi birokrasi, setiap dokumen perencanaan secara konsisten berkontribusi pada pencapaian Visi Kepala Daerah.

- b. Kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (bobot sebesar 9), yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *smart*, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Penjabaran kinerja dari Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah, sampai Unit Kerja. Pemerintah Kota Bekasi belum melakukan restrukturisasi Pohon Kinerja (*Performance Tree*) untuk memastikan setiap level jabatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap visi Kepala Daerah. Penjabaran kinerja tidak lagi sekadar membagi habis tugas rutin, melainkan membagi habis target hasil. Sebagai contoh, indikator pada tingkat Unit Kerja dirancang sebagai faktor pengungkit (*lead indicator*) bagi indikator pada tingkat Perangkat Daerah, sehingga tercipta alur sebab-akibat yang solid dan terukur dalam mengakselerasi kinerja pembangunan.
- c. Pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (bobot sebesar 15), namun pemanfaatan perencanaan kinerja belum digunakan secara optimal sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan, serta digunakan untuk mendorong pencapaian hasil pembangunan yang berkesinambungan. Dokumen perencanaan belum diposisikan sebagai pedoman operasional utama, di mana setiap pelaksanaan program wajib merujuk pada target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Langkah ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan memiliki kesinambungan antar tahun anggaran, sehingga penggunaan anggaran benar-benar mendorong hasil pembangunan yang berdampak luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pemanfaatan perencanaan kinerja telah dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pengendalian pelaksanaan program, sehingga mendukung terwujudnya capaian kinerja yang berkelanjutan dan selaras dengan sasaran strategis daerah.

Pemerintah Kota Bekasi, melalui Bapperida, telah mentransformasi pemanfaatan perencanaan kinerja agar menjadi basis utama dalam manajemen organisasi. Perencanaan kinerja kini menjadi instrumen pengendalian yang memastikan alokasi anggaran melalui SIPD-RI hanya ditujukan pada program prioritas (*Money Follows Priority*). Setiap keputusan strategis, termasuk pergeseran anggaran, didasarkan

pada rapor capaian kinerja triwulanan. Dengan demikian, pelaksanaan program di tingkat Perangkat Daerah senantiasa selaras dengan sasaran strategis daerah dan menjamin hasil pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

Secara umum, hasil ini mencerminkan bahwa kualitas perencanaan kinerja telah dilaksanakan dengan sangat baik dan konsisten, namun tetap diperlukan upaya penyempurnaan pada beberapa aspek teknis guna mencapai target secara maksimal pada periode berikutnya.

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 20,55 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20,70. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,28%.

Faktor belum tercapainya indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB adalah:

- a. Indikator Kinerja Utama tidak dimanfaatkan sebagai penetapan perencanaan kinerja pada PD, seperti pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terdapat ketidakselarasan antara IKU dan PK yang ditetapkan;
- b. Aplikasi E SAKIP belum digunakan secara optimal sebagai alat monitoring dan evaluasi secara berkala PD;
- c. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh sebagian PD tidak dilakukan secara berkala, hal ini terlihat dari laporan monev sebagian besar PD hanya sampai Triwulan II saja pada laman esr.menpan.go.id.

Dalam rangka peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, rencana tindak lanjut atau rekomendasi ke depan antara lain:

- a. Memastikan IKU pada level Pemda maupun PD telah dimanfaatkan dalam penetapan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, memastikan IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta

sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja, serta memastikan sumber data dan formulasi perhitungan dari setiap indikator yang digunakan telah sama dan tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

- b. Mendorong penggunaan aplikasi yang sudah dibangun sebagai alat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PD. Selanjutnya, memastikan monitoring dan evaluasi tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
 - c. Memastikan seluruh PD Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala dan menyampaikan hasil monev ke esr.menpan.go.id.
3. Indeks Inovasi Daerah, realisasi sebesar 94,43 (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,00. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 116,58%.

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 sebesar 94,43 sebagaimana diuraikan sebelumnya, Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM dan Anggaran dengan sangat efisien melalui berbagai kebijakan, diantaranya:

- a. Adanya komitmen pimpinan dalam memperkuat inovasi daerah dengan memfasilitasi regulasi pendukung.

Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah.

- b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2) Mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung

pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

c. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Penerbitan Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 000.9.1/3918/Bappelitbangda.Litbang tanggal 17 Juli 2024 hal Pelaporan Inovasi Daerah dan Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Walaupun demikian, Indeks Inovasi merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui a) Dukungan regulasi dalam bentuk peraturan Daerah/ Kepala Daerah b) Sinergitas secara rutin Tim Koordinasi SIDA c) Apresiasi terhadap Inovator melalui kompetisi dan penghargaan inovasi Kota Bekasi yang dikemas melalui forum yang kreatif dan inovatif secara rutin setiap tahun.

Dalam rangka peningkatan Indeks Inovasi Daerah, rencana tindak lanjut atau rekomendasi ke depan antara lain:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah;
- b. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyusunan Indeks Inovasi Daerah yang mengukur inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut yang merupakan indikator sasaran, didukung oleh 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja program Bapperida. Realisasinya IKK Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Capaian IKK Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Persentase Capaian Kinerja Program		83,30%	78,79%	94,59%	Belum Tercapai. Jumlah indikator kinerja program yang tercapai dibagi total jumlah indikator kinerja program dikali 100%, maka = $338/429 \times 100\% = 78,79\%$
2.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	100%	100%	Tercapai
3.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		100%	100%	100%	Tercapai
4.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	100%	100%	Tercapai
5.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		80%	81,25%	101,56%	Tercapai melampaui target. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan sebanyak 26 penelitian dari total 32 penelitian, sehingga $26/32 \times 100\% = 81,25\%$
6.	Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi		2 Predikat	5 Predikat	250%	Tercapai melampaui target: 1. Peringkat III Kota Terinovatif IGA 2025 2. Pengirim Inovasi Terbanyak Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 3. Top 18 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
						Inovator Aplikasi BUNG SENJA 4. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi RABU PINTAR 5. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi TESA
7.	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%	100%	100%	Tercapai
8.	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		91,81%	92,07%	100,28%	Tercapai
9.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah		88,40	88,10	99,66%	Belum Tercapai. Ada efisiensi diklat dan bimtek.
10.	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		94,40%	100%	105,93%	Tercapai

Analisis perhitungan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Capaian Kinerja Program, berdasarkan rumus perhitungannya: (jumlah indikator kinerja program yang tercapai) : (total jumlah indikator kinerja program) x 100%, maka hasilnya adalah $338/429 \times 100\% = 78,79\%$. Hal ini berarti target indikator sebesar 83,30% tidak tercapai di tahun 2025. Rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan ketercapaian kinerja program pembangunan pada periode berikutnya melalui pemetaan shadow output dan monitoring pencapaian shadow output per bulan.
2. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dikali 100%, hasilnya adalah 100%, bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah sesuai dengan RKPD.

3. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dikali 100%, hasilnya adalah 100%, bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah sesuai dengan RKPD.
4. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100%, hasilnya adalah 100%, artinya bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah sesuai dengan RKPD.
5. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran. Realisasi indikator program ini sebesar 100% dari target sebesar 100%.
6. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan. Realisasi indikator program ini sebesar 91,88% dari target sebesar 92,07%.
7. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah. Realisasi indikator program ini sebesar 88,10 dari target sebesar 88,40.
8. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel. Realisasi indikator program ini sebesar 100% dari target sebesar 94,40%.
9. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Realisasi indikator program ini sebesar 81,25% dari target sebesar 80%.
10. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi. Realisasi indikator program ini sebesar 5 Predikat dari target sebesar 2 Predikat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Renja Perubahan Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025, Bapperida Kota Bekasi melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp32.182.686.760 (Tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan hasil evaluasi dalam Simpelbang, realisasi fisik kegiatan Bapperida Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 99,96% dengan realisasi anggarannya sebesar 88,17% atau sebesar Rp28.374.554.335,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida Kota Bekasi tahun 2025 secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Bidang Perencanaan									
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah									
	Outcome: Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program	91,30%	81,58%	83,30%	78,79%	94,59%	84,90%	84,90%	92,99%
	Kegiatan 1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	16 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	5 Dokumen	40,00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
0003	Sub Kegiatan 1: Pelaksanaan Konsultasi Publik									
	Output: Tersusunnya Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00%	1 Berita Acara	3 Berita Acara	37,50%
0005	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
	Output: Tersusunnya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	8 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00%	1 Berita Acara	3 Berita Acara	37,50%
0007	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
	Output: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	14 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	5 Dokumen	35,71%
	Kegiatan 2 Analisis Data dan Informasi									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
	Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	3 Dokumen	25,00%
0002	Sub Kegiatan 1: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
	Output: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	600 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100,00%	100 Orang	200 Orang	33,33%
	Kegiatan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	28 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100,00%	4 Laporan	12 Laporan	42,86%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah								
0003	SubKegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	28 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100,00%	4 Laporan	12 Laporan	42,86%
	Kegiatan 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
	Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
0003	SubKegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
	Outcome 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	8 Laporan	32,00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
0005	Sub Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	100,00%
0006	Sub Kegiatan 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	2 Laporan	5 Laporan	35,71%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Outcome 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	24 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	4 Laporan	7 Laporan	29,17%
0002	Sub Kegiatan 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
	Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	2 Laporan	5 Laporan	35,71%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
0004	Sub Kegiatan 4: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
	Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	20,00%
	Outcome 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00%	97,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	34 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	5 Laporan	12 Laporan	35,29%
0002	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	2 Laporan	5 Laporan	35,71%
0003	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	-	-	100,00%
0004	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	18 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Laporan	6 Laporan	33,33%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota									
	Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	33 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	11 Dokumen	33,33%
0001	Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	5 Dokumen	33,33%
0006	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Laporan	6 Laporan	33,33%
	Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	92,31%	91,71%	91,81%	92,07%	100,28%	91,91%	91,91%	99,57%
	Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Output 3.2 Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	36 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	6 Laporan	12 Laporan	33,33%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
0001	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2856 Orang/Bulan	2100 Orang/Bulan	2024 Orang/Bulan	2024 Orang/Bulan	100,00%	2576 Orang/Bulan	2576 Orang/Bulan	100,00%
0007	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
	Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5 Laporan	10 Laporan	33,33%
	Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Output: Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	90 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	24 Laporan	36 Laporan	40,00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
0002	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	66 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	12 Laporan	18 Laporan	50,00%
0004	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
	Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	173 Laporan	1 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	100,00%	29 Laporan	57 Laporan	32,95%
0004	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	42 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00%	7 Paket	14 Paket	33,33%
0005	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	4 Paket	33,33%
0006	Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
0008	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	33,33%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
0009	Sub Kegiatan 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	33,33%
0010	Sub Kegiatan 6: Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD									
	Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	6 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
	Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	88,50		88,40	88,40	88,10	99,66%	88,10	99,55%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output 3.7 Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	14 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	3 Laporan	5 Laporan	35,71%
0002	Sub Kegiatan 1: Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
	Output: Tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100,00%	1 Paket	2 Paket	16,67%
0009	Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	35 Orang	-	-	-	35 Orang	35 Orang	20,00%
0011	Sub Kegiatan 3: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	554 Orang	103 Orang	44 Orang	44 Orang	100,00%	102 Orang	44 Orang	7,94%
	Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	95,33%	N/A	94,40%	94,40%	100,00%	94,59%	100,00%	104,90%
	Kegiatan 1: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	33,33%
0006	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	276 Unit	13 Unit	34 Unit	34 Unit	100,00%	42 Unit	76 Unit	27,54%
	Kegiatan 2: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100,00%	4 Laporan	7 Laporan	35,00%
0001	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	100,00%	7 Unit	7 Unit	100,00%
0002	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan									
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		41 Unit	41 Unit	100,00%	41 Unit	41 Unit	100,00%
0006	Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 Unit		40 Unit	40 Unit	100,00%	50 Unit	90 Unit	90,00%
	Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan									
	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan									
	Program Riset dan Inovasi Daerah									
	Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	85%	N/A	80%	80%	81,25%	81%	81,25%	95,59%
	Kegiatan 1: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan									
	Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai NSPK	Jumlah Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	37,50%
0003	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	33,33%
0006	Sub Kegiatan 2: Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah									
	Output: Terlaksananya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah untuk Menghasilkan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam Bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	1 Dokumen	50,00%
		2. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	3 Predikat	N/A	2 Predikat	5 Predikat	250,00%	2 Predikat	2 Predikat	233,33%
	Kegiatan 2: Inovasi dan Inovasi									
	Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Inovasi dan Inovasi sesuai NSPK	Jumlah Laporan Kegiatan Inovasi dan Inovasi sesuai NSPK	42 Laporan	N/A	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	7 Laporan	14 Laporan	33,33%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
0001	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah									
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	6 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	33,33%
0006	Sub Kegiatan 2: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual									
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Pelatihan Perlindungan KI, Fasilitas Perlindungan KI)	6 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	33,33%
0008	Sub Kegiatan 3: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi									
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk	6 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	33,33%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi								
0010	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat									
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	6 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	33,33%
0012	Sub Kegiatan 5: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi									
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	6 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	33,33%
0013	Sub Kegiatan 6: Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah									

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (7+9)	(11) = (10/4)
	Output: Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	24 Sistem Informasi	N/A	4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi	100,00%	4 Sistem Informasi	8 Sistem Informasi	33,33%
	Sub Kegiatan 7: Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi									
0018	Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	18 Pelatihan	N/A	3 Pelatihan	3 Pelatihan	100,00%	3 Pelatihan	6 Pelatihan	33,33%

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, ketercapaian program yang dihitung melalui realisasi capaian indikator program, dari 10 (sepuluh) indikator program terdapat 8 (delapan) indikator program mencapai target dan 2 (dua) indikator program yang melampaui target 100% sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Di samping itu, target indikator kegiatan dan sub kegiatan seluruhnya dapat mencapai target.

Analisis perhitungan capaian program tersebut pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Program, berdasarkan rumus perhitungannya: $(\text{jumlah indikator kinerja program yang tercapai}) : (\text{total jumlah indikator kinerja program}) \times 100\%$, maka hasilnya adalah $338/429 \times 100\% = 78,79\%$. Hal ini berarti target indikator sebesar 83,30% tidak tercapai di tahun 2025. Rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan ketercapaian kinerja program pembangunan pada periode berikutnya melalui pemetaan shadow output dan monitoring pencapaian shadow output per bulan.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diukur dengan 3 indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Formulasi perhitungan indikator ini adalah $\frac{\text{jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}}{\text{jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}} \times 100\%$, hasilnya adalah 100%, bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah sesuai dengan RKPD.
 - b. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Formulasi perhitungan indikator ini adalah $\frac{\text{jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam}}{\text{jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam}} \times 100\%$, hasilnya adalah 100%, bahwa seluruh Renja

Perangkat Daerah di lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah sesuai dengan RKPD.

- c. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100%, hasilnya adalah 100%, artinya bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah sesuai dengan RKPD.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang diukur sebagai berikut:
 - a. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran. Realisasi indikator program ini sebesar 100% dari target sebesar 100%.
 - b. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan. Realisasi indikator program ini sebesar 91,88% dari target sebesar 92,07%.
 - c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah. Realisasi indikator program ini sebesar 88,10 dari target sebesar 88,40.
 - d. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel. Realisasi indikator program ini sebesar 100% dari target sebesar 94,40%.
3. Program Riset dan Inovasi Daerah, yang diukur dengan 2 indikator:
 - a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Realisasi indikator program ini sebesar 81,25% dari target sebesar 80%.
 - b. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi. Realisasi indikator program ini sebesar 5 Predikat dari target sebesar 2 Predikat.

Berdasarkan tabel di atas, berikut hasil analisis dan evaluasi kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini disertai efisiensi penggunaan sumberdaya:

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Output kegiatan ini tercapai sebanyak 3 dokumen yaitu:

1 Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

1 Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2026;

1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 3 sub kegiatan, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub Kegiatan ini menghasilkan output 2 Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik yaitu RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data evaluasi terkini dari berbagai sektor pembangunan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga identifikasi permasalahan dan analisisnya dalam waktu yang cukup singkat.

Rencana Tindak Lanjut: Lanjutan penyusunan Pelaksanaan Konsultasi Publik pada tahun berikutnya (TA 2026).

2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota\

Sub Kegiatan ini menghasilkan output 2 Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang yaitu RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029.

Kendala/ Permasalahan:

Usulan musrenbang harus diinput melalui SIPD, namun masih terdapat usulan yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukungnya (proposal dll), dengan demikian masyarakat memerlukan waktu lebih untuk melengkapi/menyusun dokumen pendukungnya.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan hasil musrenbang untuk perencanaan berikutnya. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Telah disusun dan ditetapkan 1 Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029; 1 Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2026; 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Kendala/ Permasalahan:

Kendala dalam penyusunan RKPD maupun penyusunan perubahan RKPD yaitu penelaahan usulan pokok pikiran DPRD dan hibah yang seharusnya memerlukan waktu yang cukup dalam verifikasi usulan dan dokumen pendukungnya (proposal dan lainnya), namun dilakukan dalam waktu yang singkat.

Penyebabnya adalah penyampaian usulan hibah baik dari pokok pikiran DPRD maupun lembaga pengusul hibah ke Perangkat Daerah dan Bapperida dalam waktu yang singkat dan mendekati tenggat waktu

penyusunan dan banyak yang belum dilengkapi dokumen pendukungnya (proposal).

Rencana Tindak Lanjut:

Adapun rencana tindak lanjut terkait penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun N dan penyusunan perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun N-1 ke depan adalah menyampaikan edaran kepada DPRD Kota Bekasi dan lembaga pengusul hibah agar dapat menyampaikan pokok pikiran DPRD/usulan hibah jauh-jauh hari dengan dilengkapi dokumen pendukungnya (proposal) agar lebih banyak waktu verifikasi usulan dan dokumen pendukungnya (proposal) untuk selanjutnya diolah ke dalam RKPD dan Renja PD.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

Realisasi Sub Kegiatan ini adalah telah dilaksanakan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah.

Kendala/ Permasalahan: terdapat kebijakan efisiensi penggunaan anggaran.

Rencana Tindak Lanjut:

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adapun output sub kegiatannya adalah sebagai berikut: 4 Laporan Hasil Monev RKPD Triwulanan, 1 Laporan Hasil Monev RKPD Akhir Tahun, 4 Laporan Hasil Monev Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan DKI Jakarta Triwulanan, 1 Laporan Hasil Monev Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan DKI Jakarta Akhir Tahun, 1 Laporan Hasil Monev DBHCHT, 1 Laporan Hasil Monev DAK, dan 1 Laporan Monev Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran.

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data dan informasi terutama capaian indikator makro yang dihitung oleh BPS beberapa belum tersedia/belum dipublikasikan sehingga belum dapat disajikan di awal waktu.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan sebagai bahan dalam perumusan rencana pembangunan periode berikutnya.

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun output sub kegiatannya adalah 1 Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi adalah setiap tahun Aplikasi SIPD RI diperbarui oleh Kemendagri sehingga perlu sosialisasi pemahaman kembali untuk seluruh Perangkat Daerah.

Rekomendasi/Tindak Lanjutnya adalah Pembinaan SIPD ke seluruh Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

Berdasarkan tabel di atas, berikut hasil analisis dan evaluasi kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :

- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan 2 laporan hasil asistensi.

Kendala/ Permasalahan: Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan. Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.

Rencana Tindak Lanjut: Sosialisasi regulasi terbaru dan penerapan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam/

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan 2 laporan hasil asistensi. Kendala/ Permasalahan: Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan. Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.

Rencana Tindak Lanjut: Sosialisasi regulasi terbaru dan penerapan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan antara lain:

- a) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Kendala/ Permasalahan: Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi,

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan. Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.

Rencana Tindak Lanjut: Sosialisasi regulasi terbaru dan penerapan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

- b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

Kendala/ Permasalahan: Karena keterbatasan waktu sehingga tidak semua kegiatan dapat dilakukan monitoring ke lapangan.

Rencana Tindak Lanjut: Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

- c) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

Kendala/ Permasalahan: Pengumpulan data sektoral dari Perangkat Daerah.

Rencana Tindak Lanjut: Pemanfaatan hasil Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan mencapai/melampaui target kinerja tersebut adalah:

- (1) adanya komitmen Tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan Tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
- (2) disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detail/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya;
- (3) tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan;
- (4) dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Perumusan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pembangunan di masa lalu sebagai dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis, pemetaan permasalahan pada Bapperida Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pemetaan Permasalahan pada Bapperida Kota Bekasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi	1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	1. Belum optimalnya pengembangan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis digital
			2. Belum optimalnya integrasi data kinerja Pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah
			3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan
			4. Belum meratanya kapasitas SDM apartur dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
		2.	Keterbatasan Data dan Informasi	1. Data pembangunan sering tidak mutakhir, tidak terintegrasi, dan berbeda antar-instansi sehingga sulit merumuskan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) 2. Belum optimalnya mekanisme pelaporan kinerja pembangunan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga lain
		3.	Partisipasi Masyarakat yang rendah	Musrenbang atau konsultasi publik sering formalitas, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi.
2.	Belum optimalnya penerapan hasil riset dan inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan	1	Belum optimalnya hasil riset dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan	1. Terbatasnya jumlah dan ragam kegiatan riset dan inovasi 2. Terbatasnya kapasitas SDM periset, dan inventor/inovator
		2	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan riset dan inovasi dalam menunjang perencanaan pembangunan	1. Belum optimalnya sinkronisasi, kolaborasi dan pembinaan riset dan inovasi 2. Belum optimalnya jejaring dan kerjasama riset dan inovasi 3. Belum optimalnya diseminasi riset dan inovasi

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kota Bekasi adalah belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi, serta belum optimalnya penerapan hasil riset dan inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan dengan penyebab dan akar permasalahannya sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas.

Di samping itu, terdapat faktor internal dan eksternal yang dihadapi Bapperida Kota Bekasi. Faktor internal meliputi:

1. Kekuatan/ *Strenght* (S)
 - a. Struktur organisasi dan tugas serta fungsi organisasi Bapperida telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;
 - b. Tersedianya jumlah SDM aparatur Bapperida yang memadai;
 - c. Alokasi dana APBD untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;
 - d. Terdapatnya berbagai hasil monitoring, evaluasi, riset, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan.
2. Kelemahan/ *Weakness* (W)
 - a. Belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;
 - c. Kebutuhan terhadap hasil riset dan inovasi untuk pembangunan belum terpenuhi, banyak kebutuhan tetapi kapasitas sedikit.

Faktor eksternal meliputi:

1. Peluang/ *Opportunity* (O)
 - a. Ketersediaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, riset dan inovasi;
 - b. Ketersediaan regulasi atau peraturan perundangan;
 - c. Ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur memadai;
 - d. Adanya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari daerah lain, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan lain-lain.
2. Ancaman/ *Thread* (T)
 - a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
 - b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen *stakeholder* (masyarakat, DPRD, atau lembaga lainnya) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
 - c. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, faktor internal dan eksternal, dirumuskan isu penting yang dihadapi Bapperida Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk tahun 2027 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan digitalisasi.

Kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis karena berdasarkan hasil identifikasi permasalahan bahwa belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pentingnya pemanfaatan hasil evaluasi, riset dan inovasi dalam perumusan perencanaan Pembangunan agar menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan digitalisasi hasil evaluasi, riset dan inovasi, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur.

2. Transformasi Kelembagaan Riset dan Inovasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah.

Transformasi Kelembagaan menjadi isu strategis yang kedua karena melalui momentum transformasi kelembagaan dari Bapperida menjadi Bapperida berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Diharapkan dapat memperkuat fondasi penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Bapperida. Peningkatan kapasitas Bapperida diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan daya saing Kota Bekasi.

2.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang dilakukan untuk memastikan adanya keterkaitan antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir DPRD) adalah hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat dan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat ditelaah dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Telaah juga dilakukan untuk memastikan bahwa usulan tersebut dapat dipetakan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah yang relevan serta tidak terjadi duplikasi dengan usulan dari sumber perencanaan lainnya.

Dalam proses penyusunan Renja PD, Pokok-Pokok Pikiran DPRD tidak secara otomatis menjadi program atau kegiatan perangkat daerah. Setiap usulan terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaah berdasarkan kewenangan, kesesuaian dengan dokumen perencanaan, kelayakan pelaksanaan, lokasi dan kelompok sasaran, serta ketersediaan anggaran. Hasil telaah tersebut menjadi salah satu bahan dalam penyempurnaan rancangan Renja PD.

Dengan demikian, telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD diharapkan dapat memperkuat keterpaduan antara aspirasi masyarakat, hasil penjaringan DPRD, prioritas pembangunan daerah, dan perencanaan perangkat daerah sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih responsif, terarah, dan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak ada pokir DPRD yang khusus ditujukan kepada Bapperida Kota Bekasi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang disampaikan usulan kegiatan dari masyarakat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, maupun Tingkat Kota tidak ada usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2027 yang ditujukan kepada Bapperida Kota Bekasi.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Bapperida

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses *review* ini dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD atau belum. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD.

Hasil *review* Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2027 terkait Bapperida adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 telah sesuai dengan kebutuhan Bapperida untuk Tahun Anggaran 2027, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
	Outcome: Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program	Kota Bekasi	86,50%	Rp 2.650.000.000		Outcome: Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program	Kota Bekasi	86,50%	Rp 2.650.000.000	
	Kegiatan 1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						Kegiatan 1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 1.400.000.000		Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 1.400.000.000	
1	Sub Kegiatan 1: Pelaksanaan Konsultasi Publik					1	Sub Kegiatan 1: Pelaksanaan Konsultasi Publik					
	Output: Tersusunnya Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Bekasi	1 Berita Acara	Rp 200.000.000		Output: Tersusunnya Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Bekasi	1 Berita Acara	Rp 200.000.000	
2	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					2	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					
	Output: Tersusunnya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Berita Acara	Rp 700.000.000		Output: Tersusunnya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Berita Acara	Rp 700.000.000	
3	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					3	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					
	Output: Ditetapkannya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 500.000.000		Output: Ditetapkannya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)					Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)				
	Kegiatan 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Kegiatan 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 350.000.000		Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 350.000.000	
4	Sub Kegiatan 1: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					4	Sub Kegiatan 1: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Output: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 250.000.000		Output: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 250.000.000	
5	Sub Kegiatan 2: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					5	Sub Kegiatan 2: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					
	Output: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Bekasi	100 Orang	Rp 100.000.000		Output: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Bekasi	100 Orang	Rp 100.000.000	
	Kegiatan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Kegiatan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 550.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 550.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Perencanaan Pembangunan Daerah				
6	SubKegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					6	SubKegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	Rp 550.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	Rp 550.000.000	
	Kegiatan 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						Kegiatan 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					
	Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 350.000.000		Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 350.000.000	
7	SubKegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					7	SubKegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 350.000.000		Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 350.000.000	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					2.

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Outcome 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bekasi	100,00%	Rp 400.000.000		Outcome 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bekasi	100,00%	Rp 400.000.000	
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 400.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 400.000.000	
8	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						8	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 150.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 150.000.000	
9	Sub Kegiatan 2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						9	Sub Kegiatan 2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
	Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 250.000.000		Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Outcome 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kota Bekasi	100,00%	Rp 590.000.000		Outcome 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kota Bekasi	100,00%	Rp 590.000.000	
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 590.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 590.000.000	
10	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						10	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
	Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 140.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 140.000.000	
11	Sub Kegiatan 2: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						11	Sub Kegiatan 2: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
	Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 450.000.000		Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 450.000.000	
	Outcome 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program	Kota Bekasi	100,00%	Rp 1.400.000.000		Outcome 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD	Kota Bekasi	100,00%	Rp 1.400.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 1.400.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 1.400.000.000	
12	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						12	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
	Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 150.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 150.000.000	
13	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						13	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						
	Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 1.250.000.000		Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 1.250.000.000	
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota						3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota						
	Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1.	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kota Bekasi	100%	Rp 100.000.000		Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1.	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kota Bekasi	100%	Rp 100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	5 Dokumen	Rp 100.000.000		Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	5 Dokumen	Rp 100.000.000	
14	Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					14	Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 50.000.000		Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 50.000.000	
15	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 50.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 50.000.000	
	Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Kota Bekasi	92,01%	Rp 24.404.668.069		Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Kota Bekasi	92,01%	Rp 24.404.668.069	
	Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Output 3.2 Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	6 Laporan	Rp 22.964.668.069		Output 3.2 Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	6 Laporan	Rp 22.964.668.069	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2856 Orang/Bulan	Rp 22.949.668.069		Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2856 Orang/Bulan	Rp 22.949.668.069	
17	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					17	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 15.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 15.000.000	
	Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 30.000.000		Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 30.000.000	
18	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 30.000.000		Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 30.000.000	
19	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					19	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Bekasi	12 Laporan			Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Bekasi	12 Laporan		

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				
	Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah						Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	29 Laporan	Rp 1.410.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	29 Laporan	Rp 1.410.000.000	
20	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Bekasi	7 Paket	Rp 500.000.000		Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Bekasi	7 Paket	Rp 500.000.000	
21	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					21	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	Rp 200.000.000		Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	Rp 200.000.000	
22	Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					22	Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
	Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 30.000.000		Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 30.000.000	
23	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi Kunjungan Tamu					23	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi Kunjungan Tamu					
	Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 30.000.000		Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 30.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	Sub Kegiatan 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24	Sub Kegiatan 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 500.000.000		Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 500.000.000	
25	Sub Kegiatan 6: Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD					25	Sub Kegiatan 6: Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD					
	Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 100.000.000		Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 100.000.000	
26	Sub Kegiatan 7: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					26	Sub Kegiatan 7: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
	Output: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 50.000.000		Output: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
	Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Kota Bekasi	88,44	Rp 780.000.000		Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Kota Bekasi	88,44	Rp 780.000.000	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Output 3.7 Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 780.000.000		Output 3.7 Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 780.000.000	
27	Sub Kegiatan 1: Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya					27	Sub Kegiatan 1: Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Output: Tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	1 Paket	Rp 300.000.000		Output: Tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	1 Paket	Rp 300.000.000	
28	Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						28	Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
	Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	35 Orang	Rp 280.000.000		Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	35 Orang	Rp 280.000.000	
29	Sub Kegiatan 3: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						29	Sub Kegiatan 3: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
	Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	102 Orang	Rp 200.000.000		Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	102 Orang	Rp 200.000.000	
	Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kota Bekasi	94,77%	Rp 1.625.000.000		Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kota Bekasi	94,77%	Rp 1.625.000.000	
	Kegiatan 1: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Kegiatan 1: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 500.000.000		Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 500.000.000	
30	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Bekasi	50 Unit	Rp 500.000.000		Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Bekasi	50 Unit	Rp 500.000.000	
	Kegiatan 2: Pemeliharaan Barang Milik							Kegiatan 2: Pemeliharaan Barang Milik						

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 1.125.000.000		Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 1.125.000.000	
31	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					31	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	7 Unit	Rp 425.000.000		Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	7 Unit	Rp 425.000.000	
32	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan					32	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan					
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	45 Unit	Rp 300.000.000		Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	45 Unit	Rp 300.000.000	
33	Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					33	Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Bekasi	100 Unit	Rp 200.000.000		Output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Bekasi	100 Unit	Rp 200.000.000	
34	Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					34	Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	1 Unit	Rp 200.000.000		Output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	1 Unit	Rp 200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		yang dipelihara/ direhabilitasi						yang dipelihara/ direhabilitasi				
	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan						Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan					
4.	Program Riset dan Inovasi Daerah					4.	Program Riset dan Inovasi Daerah					4.
	Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Kota Bekasi	82%	Rp 300.000.000		Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Kota Bekasi	82%	Rp 300.000.000	
	Kegiatan 1: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						Kegiatan 1: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					
	Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai NSPK	Indikator: Jumlah Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 300.000.000		Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai NSPK	Indikator: Jumlah Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 300.000.000	
35	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					35	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 300.000.000		Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 300.000.000	
		2. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	Kota Bekasi	2 Predikat	Rp 2.500.000.000			2. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	Kota Bekasi	2 Predikat	Rp 2.500.000.000	
	Kegiatan 2: Inovasi dan Inovasi						Kegiatan 2: Inovasi dan Inovasi					

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Inovensi dan Inovasi sesuai NSPK		Jumlah Laporan Kegiatan Inovensi dan Inovasi sesuai NSPK	Kota Bekasi	7 Laporan	Rp 2.500.000.000	Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Inovensi dan Inovasi sesuai NSPK		Jumlah Laporan Kegiatan Inovensi dan Inovasi sesuai NSPK	Kota Bekasi	7 Laporan	Rp 2.500.000.000	
36	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah						36	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah					
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 300.000.000	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 300.000.000	
37	Sub Kegiatan 2: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual						37	Sub Kegiatan 2: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual					
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Pelatihan Perlindungan KI, Fasilitas Perlindungan KI)	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 250.000.000	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Pelatihan Perlindungan KI, Fasilitas Perlindungan KI)	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 250.000.000	
38	Sub Kegiatan 3: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi						38	Sub Kegiatan 3: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi					
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 450.000.000	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 450.000.000	
39	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan,						39	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan,					

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat						dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat					
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 400.000.000		Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 400.000.000	
40	Sub Kegiatan 5: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi					40	Sub Kegiatan 5: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi					
	Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 450.000.000		Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 450.000.000	
41	Sub Kegiatan 6: Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah					41	Sub Kegiatan 6: Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah					
	Output: Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Kota Bekasi	4 Sistem Informasi	Rp 350.000.000		Output: Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Kota Bekasi	4 Sistem Informasi	Rp 350.000.000	
42	Sub Kegiatan 7: Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi					42	Sub Kegiatan 7: Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi					
	Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	Kota Bekasi	3 Pelatihan	Rp 300.000.000		Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	Kota Bekasi	3 Pelatihan	Rp 300.000.000	
					Rp 34.749.668.069						Rp 34.749.668.069	

2.7. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka upaya mencapai tujuan dan sasaran Bapperida Kota Bekasi, telah dikembangkan inovasi sebagai berikut:

1. SIDIKJARI (Sistem Informasi Data Induk Kelitbangan dan Jaringan Inovasi)
2. SIENCANG (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran)
3. SITABANG (Sistem Informasi Data Pembangunan Kota Bekasi)
4. E-MONEV (Electronic-Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan)
5. SIBANDEK (Sistem Pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta).
6. PELITA (Pemetaan Teknologi Tepat Guna Kota Bekasi)
7. SEMANGAT (Sistem Pembinaan Kelembagaan Posyantek)
8. POIN KOBE (Pojok Inovasi Kota Bekasi)
9. SAPATRI (Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Interaktif)

Berikut uraian inovasi-inovasi yang dikembangkan tersebut adalah:

Tabel 2.7.
Uraian Inovasi pada Bapperida Kota Bekasi

No.	Inovasi	Uraian
1	SIENCANG (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran)	Siencang merupakan aplikasi berbasis web sebagai bentuk inovasi digital yang dibuat untuk merencanakan kegiatan dan anggaran agar lebihcepat dan efsien serta akuntable, dari segi namanya yang sudah identik dengan kultur betawi membuat aplikasi inilayak diberikan reward oleh pemerintah kota bekasi senidiri. Sebelumnya, dalam merencanakan suatu anggaran kegiatan Pemkot Bekasi masih menggunakan satu aplikasi lama yang kurang efisien dan akuntabel dari segi Standar Biaya Masukan (SBM). Padahal Tim anggaran Pemkot Bekasi harus lebih teliti dalam melihat SBM yang dibuat oleh masing-masing instansi. Karena apabila harga satuan yang dibuat tidak sesuai standar yang ditetapkan, hal ini tentu sangat berbahaya bagi pengguna anggaran yang ada. Dengan adanya Siencang maka semua harga standar maksimal yang sudah ditentukan tidak lagi melebihi batas yang ditetapkan. Disinilah adanya akuntabilitas dan efisiensi dari aplikasi ini. Aplikasi Siencang yang dikembangkan sejak tahun 2018 hingga saat ini, dilengkapi dengan modul RKPD, Pra-RKA dengan Model ASB, Geolocation serta PPAS. Dengan begitu, semua input data bisa terintegrasi dan dapat disajikan secara akurat dan meminimalisir kemungkinan kesalahan, sehingga rencana program bisa dilaksanakan secepatnya. Manfaat yang diperoleh dari Siencang adalah dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalamjangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah, kegiatan lima tahunan daerah,serta menghitung secara akurat besaran alokasi anggarannya sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
2	SIDIKJARI (Sistem Informasi Data Induk Kelitbangan dan Jaringan Inovasi)	SIDIKJARI adalah sebuah aplikasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola dan memanfaatkan data hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi. Aplikasi ini hadir sebagai solusi dalam menghadapi tantangan era 4.0, di mana teknologi informasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan yang berbasis data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, SIDIKJARI menghimpun data penelitian dan inovasi yang dilakukan oleh berbagai

No.	Inovasi	Uraian
		perangkat daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laman www.sidikjari.bekasikota.go.id. Aplikasi SIDIKJARI menyediakan berbagai layanan yang meliputi Data Induk Kelitbangan, Jaringan Inovasi, Kerjasama Penelitian, Rekomendasi Izin Penelitian, Usulan Penelitian, dan Usulan Inovasi Masyarakat. Melalui fitur-fitur ini, pengguna dapat mengakses informasi secara komprehensif mengenai hasil penelitian dan inovasi yang ada di Kota Bekasi, mengajukan izin atau kerjasama penelitian, serta memberikan usulan inovasi untuk perbaikan layanan publik. Sebagai inovasi daerah, SIDIKJARI bertujuan untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang lebih optimal serta membentuk budaya kreatif dan inovatif di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dengan adanya sistem pengelolaan knowledge yang terintegrasi ini, informasi mengenai dokumen hasil kelitbangan dan inovasi dapat tersusun secara sistematis dan akurat, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh data yang dapat diandalkan dan digunakan untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Manfaat : 1. Tersedianya data informasi kelitbangan dan inovasi dari berbagai stakeholders yang akan diintegrasikan; 2. Terbangunnya aplikasi dashboard untuk menyajikan data kelitbangan dan inovasi secara online; 3. Tersedianya informasi/data yang berasal dari berbagai stakeholders yang tengah melaksanakan penelitian; 4. Tersedianya fasilitas untuk monitoring dan evaluasi data kelitbangan dan inovasi; 5. Terdefnisikannya berbagai kebutuhan data/usulan penelitian dan atau inovasi dari masyarakat; 6. Terbangunnya sinergitas interkoneksi antar stakeholders yang memungkinkan terjadinya proses penyajian data yang real time; 7. Pendayagunaan basis data kelitbangan yakni sebagai sumber data kelitbangan dan Dasar penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan ; 8. Penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak; 9. Terintegrasikannya sistem informasi dengan command center, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. 10. Terintegrasikannya sistem informasi dengan berbagai aplikasi pengelolaan data indeks di Kemendagri RI dan BRIN.
3	SIBANDEK (Sistem Pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta)	SIBANDEK atau Sistem Pengelolaan Bantuan Keuangan DKI Jakarta merupakan aplikasi sebagai wujud kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam hal penanganan sampah di Bantar Gebang. SIBANDEK dirancang sebagai sistem pelayanan online yang memungkinkan proses transfer data menjadi lebih cepat dan mudah. SIBANDEK adalah inovasi berbasis online yang dapat diakses melalui https://sibandek.bekasikota.go.id/ yang memungkinkan petugas pelayanan dapat melakukan kegiatan pelayanan kapanpun dan dimanapun. Sistem pelayanan yang dapat diakses secara online memberikan dampak pada penghematan anggaran karena tidak memerlukan kertas dalam mendokumentasikan data. Inovasi SIBANDEK memiliki beberapa manfaat antara lain untuk mempermudah pengajuan proposal, meminimalisasi kesalahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan atau RKA mengurangi kerusakan atau hilangnya dokumen dan membantu menghasilkan laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan di Bantar Gebang dapat segera dilakukan sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di TPA, dan mencegah pencemaran lingkungan baik terhadap tanah, air maupun udara. Manfaat inovasi sibandek adalah mempermudah pengajuan proposal, Meminimalisasi kesalahan dalam penyusunan RKA kegiatan dan Membantu menghasilkan laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku
4	SITABANG (Sistem Informasi Data	TABANG adalah sebuah aplikasi inovatif berbasis digital yang dikembangkan oleh Bapperida Kota Bekasi untuk mempermudah proses pendataan pembangunan di Kota Bekasi. Aplikasi ini dirancang sebagai respons terhadap Peraturan Wali Kota

No.	Inovasi	Uraian
	Pembangunan Kota Bekasi)	Bekasi Nomor 87 tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan. Dengan menggunakan TABANG, seluruh data perencanaan yang terkait dengan pembentukan realisasi indikator program dapat diinventarisir dengan mudah, memungkinkan penghitungan realisasi tiap tahun dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Inovasi ini diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif dalam mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD, serta mengacu pada prioritas pembangunan Provinsi yang diintegrasikan dalam RPJMN. Manfaat inovasi tabang adalah memberikan informasi realisasi indikator kinerja pembangunan baik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari beberapa perangkat daerah.
5	SI MONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan)	Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (M&E) adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi digital. Inovasi ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu pengumpulan data secara elektronik, analisis data menggunakan teknologi analitika dan kecerdasan buatan, pemantauan dan evaluasi real-time, serta antarmuka yang mudah digunakan. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan disimpan dalam basis data terpusat, memungkinkan proses monitoring dan evaluasi yang lebih cepat dan akurat. Dengan fitur analisis data canggih, sistem ini dapat memberikan indikator kinerja, tren pembangunan, dan perbandingan antara target dan realisasi pembangunan. Selain itu, inovasi ini dirancang agar dapat diakses melalui berbagai platform digital, seperti perangkat mobile dan desktop, untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Manfaat SI MONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan) adalah dapat Memahami Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan mulai proses perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan Keuangan Daerah serta Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai dasar implementasi SIPD untuk diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi.
6	PELITA (Pemetaan Teknologi Tepat Guna)	Pengembangan sistem PELITA (Pemetaan Teknologi Tepat Guna) oleh Bapperida Kota Bekasi merupakan inovasi baru yang dirancang untuk mempermudah pemetaan dan pengelolaan data TTG. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, bahwa pengertian dari Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Sistem ini menyediakan informasi yang sistematis dan akurat terkait teknologi yang telah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini juga akan membantu mengintegrasikan berbagai potensi sumber daya dan inovasi teknologi di masyarakat sehingga dapat lebih mudah diakses Manfaat : - Peningkatan Efisiensi dalam Penyediaan Informasi TTG: Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai TTG, sehingga memudahkan mereka dalam mencari solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal. - Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat: Dengan pemanfaatan TTG, masyarakat akan memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas, menghasilkan nilai tambah pada produk, dan membuka peluang usaha baru yang efisien. - Mengurangi Duplikasi dan Meningkatkan Koordinasi: Sistem ini membantu menghindari duplikasi inovasi TTG dan mempermudah kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengembangkan teknologi yang efisien.

No.	Inovasi	Uraian
7	SEMANGAT (Sistem Pembinaan Kelembagaan Posyantek)	SEMANGAT dirancang untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui posyantek. Inovasi ini mendorong inventor TTG untuk bergabung dengan Posyantek, sehingga pengembangan inovasi TTG dapat lebih optimal melalui pembinaan dari Posyantek. Inovasi ini mengintegrasikan pengembangan TTG yaitu penjarangan Inventor TTG, fasilitasi inventor dengan posyantek, digitalisasi pengelolaan data inovasi TTG dan Digitalisasi evaluasi posyantek. Manfaat : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Posyantek b. Meningkatkan kualitas pengelolaan Posyantek c. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan posyantek d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna e. Meningkatkan kemandirian masyarakat
8	POIN KOBE (Pojok Inovasi Kota Bekasi)	POIN KOBE mengintegrasikan siklus inovasi dari tahap konsultasi ide, usulan, pelaporan, pendampingan, pembinaan, hingga fasilitasi kompetisi guna memangkas birokrasi manual dan penilaian subjektif menjadi tata kelola digital berbasis poin yang objektif. POIN KOBE membuka ruang penjarangan untuk menggali gagasan kreatif dan solutif sejak dini, menstandarisasi pengajuan proposal agar target dan indikator keberhasilan inovasi terukur, menyediakan basis data pemantauan real-time yang akuntabel dan transparan, memberikan asistensi teknis guna mematangkan sistem dan meminimalkan risiko kegagalan, memperkuat kelembagaan dan regulasi hukum demi menjamin keberlanjutan inovasi, serta memberikan apresiasi dan menyaring inovasi terbaik untuk diakselerasi ke tingkat nasional. Manfaat : a. Memberikan ruang bagi pegawai untuk menyalurkan gagasan kreatif secara mudah b. Mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan proposal inovasi secara digital c. Menyediakan data perkembangan inovasi secara transparan dan real-time - Mematangkan kesiapan teknis para inovator di lapangan melalui asistensi ahli - Menjamin keberlanjutan inovasi melalui penguatan regulasi dan kelembagaan
9	SAPATRI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Administrasi dan Tracking Registrasi HAKI)	Aplikasi SAPATRI merupakan inovasi berbasis digital yang digunakan untuk mendukung pengelolaan administrasi dan pemantauan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) secara terintegrasi. SAPATRI mendukung pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kekayaan intelektual bagi inovasi, kreatifitas dan kekayaan intelektual masyarakat, untuk membantu masyarakat, Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik dalam pendaftaran HAKI pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI. Manfaat : a. Mempermudah pengelolaan administrasi HAKI b. Memudahkan pemantauan status registrasi HAKI c. Mendukung perlindungan hasil inovasi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Pada tahun 2027 rumusan tujuan dan sasaran Bapperida Kota Bekasi mempedomani Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Bapperida Kota Bekasi memiliki 1 (satu) tujuan yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota" serta memiliki 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan; dan (2) Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran (Indikator Kinerja Utama/IKU) serta target yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Bapperida Kota Bekasi pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator, dan Target

Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68,83
		1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1.1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	22,86
				1.2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	21,10
		2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	81,50

Sumber: Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Atas indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu diidentifikasi risiko atau dilaksanakan manajemen risiko untuk memastikan bahwa sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian sasaran organisasi. Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mempengaruhi pencapaian target capaian sasaran strategis Bapperida Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Identifikasi Risiko pada Bapperida Kota Bekasi

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RISIKO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(1)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan		Sasaran dan indikator kinerja belum selaras dengan dokumen perencanaan daerah	Penguatan Penyusunan pohon kinerja, <i>crosscutting</i> dan <i>cascading</i>
		1.1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Ketidaksesuaian antara RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja	Harmonisasi dokumen perencanaan secara berkala
			Monitoring dan evaluasi perencanaan belum optimal	Penguatan monitoring dan evaluasi perencanaan secara berkala
		1.2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Indikator kinerja tidak dapat diukur secara jelas	Penyusunan pedoman pengukuran indikator kinerja
			Pengukuran kinerja belum berbasis outcome	Peningkatan kualitas indikator kinerja outcome berorientasi hasil
			Target kinerja tidak realistis	Penguatan analisis data dalam penetapan target
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tema riset tidak sesuai kebutuhan perangkat daerah	Penyusunan <i>roadmap</i> riset berbasis isu strategis daerah
		Indeks Inovasi Daerah	Kerja sama dengan inovator belum berkelanjutan	Kompetisi dan penghargaan inovasi daerah
			Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian belum optimal	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan BRIN serta lembaga penelitian

3.2. Arah Kebijakan

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterikatan antartingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam RKPD Kota Bekasi Tahun 2027, Bapperida menyusun sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Kota Bekasi Tahun 2027

Tema Pembangunan Tahun 2027			
Nasional		Kota Bekasi	
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri		Peningkatan Ketahanan Kota melalui Optimalisasi Belanja Pembangunan yang Mendorong Produktivitas Tinggi	

Prioritas Pembangunan			Kota Bekasi	
Nasional				
PN1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PK4	Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
			PK5	Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital
PN5	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		PK1	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian
PN3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi		PK3	Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif dan Digital
PN4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi		PN2	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan

Prioritas Pembangunan			
Nasional			Kota Bekasi
	Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas		
PN5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		-
PN6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PK3	Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif dan Digital
		PK4	Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
PN7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PK5	Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital
PN8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PK4	Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2027, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2027, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dilaksanakan misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi Pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;

5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

Memperhatikan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut, Bapperida Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, misi kelima **“Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren”**, dengan tujuan **“Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif”**, dan sasaran kedua **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota”**.

Keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Bapperida Kota Bekasi dalam urusan perencanaan yaitu perumusan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi salah satu aspek penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan menjadi komponen terbesar dalam evaluasi SAKIP dengan bobot 30 persen. Hal ini berkenaan dengan esensi dari perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Bapperida Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut harus memastikan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi setiap tahunnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahunan atau penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan melalui rangkaian penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan Rancangan Akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Dalam proses musrenbang RKPD, pelaksanaan memperhatikan isu gender yaitu partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan yang mengikuti musrenbang. Data peserta pelaksanaan

Musrenbang RKPD, jumlah laki-laki sebanyak 185 orang sedangkan jumlah perempuan sebanyak 55 orang. Untuk itu, masih perlu ditingkatkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang, salah satunya dengan mengundang lembaga perempuan lebih banyak.

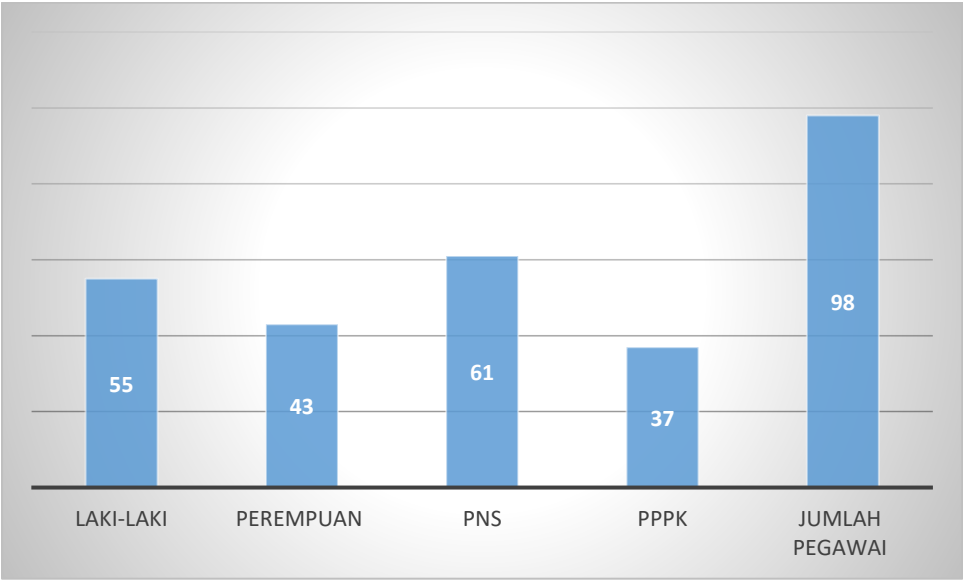
Selain itu, tugas Bapperida Kota Bekasi dalam urusan penelitian dan pengembangan yaitu pemanfaatan hasil kelitbangan yang berkualitas di berbagai bidang pembangunan, serta inovasi dan teknologi berperan penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, serta harus mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja daerah. Dengan demikian, diharapkan kebijakan di pemerintah daerah baik dalam bentuk program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, lebih terfokus, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Arah kebijakan Bapperida Kota Bekasi mengacu pada Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029: Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.	Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan komitmen dan keterpaduan antar pemangku kepentingan terkait dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan, dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi	
			Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, jejaring, kemitraan dan kerjasama serta insentif lintas pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.	

Bapperida Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung oleh 98 orang aparatur yang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 43 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 34 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), sebagaimana ditunjukkan dalam gambar grafik berikut:

Gambar 3.1.
Jumlah Aparatur Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025

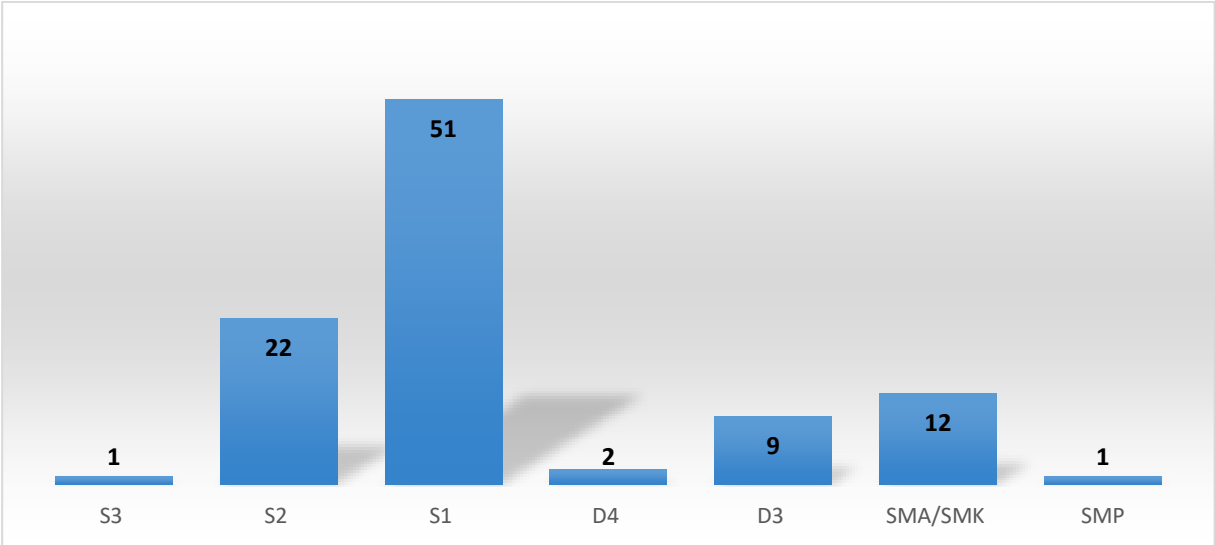


Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kota Bekasi, 2025

Apabila dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, sebagian besar aparatur Bapperida Kota Bekasi berada pada Golongan III sebanyak 47 orang atau 77,05%, sisanya Golongan IV sebanyak 13 orang atau 21,31% dan masih ada Golongan II sebanyak 1 orang atau 1,64%.

Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur Bapperida Kota Bekasi, jumlah aparatur PNS dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 20 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 31 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D4 sebanyak 2 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 4 orang, dan PNS dengan jenjang pendidikan SLTA/SMK sebanyak 3 orang. Selanjutnya jumlah PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, PPPK dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang, PPPK dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 5 orang, dan PPPK dengan jenjang pendidikan SMK/SMK sebanyak 9 orang, dan SMP sebanyak 1 orang sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

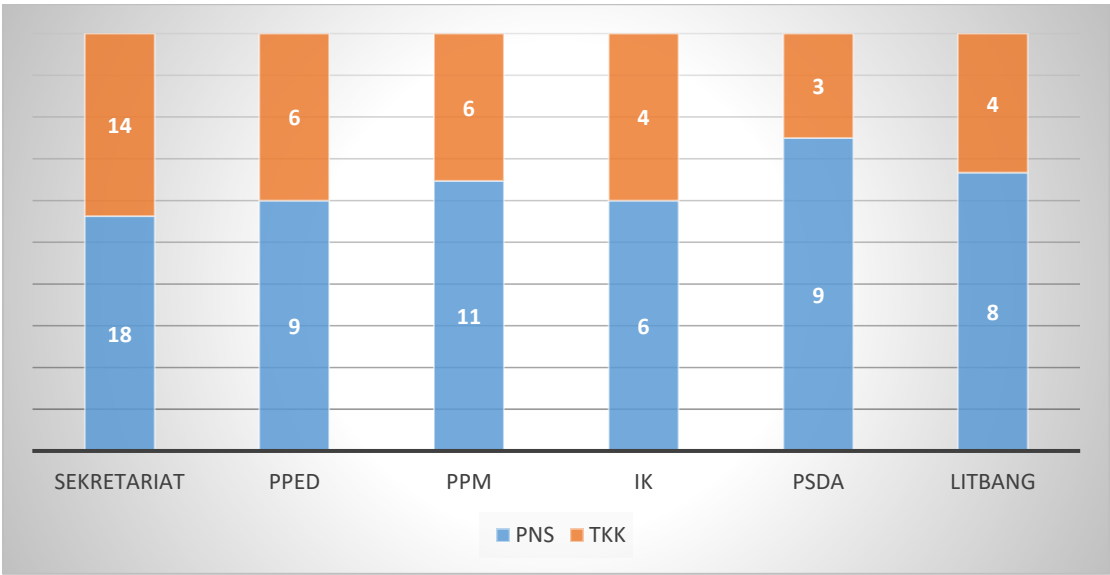
Gambar 3.2
Jumlah Aparatur Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Diolah dari Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kota Bekasi, 2025

Seluruh aparatur Bapperida tersebar di unit/Bidang sebagai berikut:

Gambar 3.3
Jumlah Aparatur Bapperida Tahun 2025 Berdasarkan Bidang/ Unit Kerja



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kota Bekasi, 2025

Secara kuantitas aparatur Bapperida sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana planologi, dan sarjana statistik. Hal ini diperlukan untuk pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan, serta terkait pembangunan sistem penelitian dan

pengembangan diperlukan SDM aparatur yang ahli seperti Fungsional Pranata Komputer dari Sarjana Informatika. Di samping itu, untuk perencanaan wilayah kota diperlukan SDM aparatur dari Sarjana Planologi, serta untuk pengolahan data perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan diperlukan SDM aparatur dari Sarjana Statistik.

Aparatur Bapperida Kota Bekasi tersebut terdistribusi ke sub unit kerja sesuai dengan susunan organisasi Bapperida Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi), yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 merupakan implementasi tahun ketiga dari Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang secara simultan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2027.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Tahun 2027, Bapperida Kota Bekasi akan melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan pagu sebesar Rp Rp31.403.543.386,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang sumber pendanaannya dari APBD Kota Bekasi.

Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida Kota Bekasi disertai indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2027 serta kebutuhan dana atau pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027
dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	01				Bidang Urusan Perencanaan									
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah									
5	01	02	2.01		Outcome: Meningkatkan Kinerja Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program	Persen (%)	Kota Bekasi	86,50%	Rp 2.037.506.000	APBD Kota Bekasi	88,10%	Rp 2.650.000.000	
5	01	02	2.01		Kegiatan 1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									
					Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 1.348.506.000	APBD Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 1.400.000.000	
5	01	02	2.01	0003	Sub Kegiatan 1: Pelaksanaan Konsultasi Publik									
					Output: Tersusunnya Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Kota Bekasi	2 Berita Acara	Rp 138.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Berita Acara	Rp 200.000.000	
5	01	02	2.01	0005	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
					Output: Tersusunnya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Kota Bekasi	2 Berita Acara	Rp 310.506.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Berita Acara	Rp 700.000.000	
5	01	02	2.01	0007	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Output: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	Kota Bekasi	3 Dokumen	Rp 900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	Rp 500.000.000	
5	01	02	2.02		Kegiatan 2: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
					Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 289.000.000	APBD Kota Bekasi	2 Dokumen	Rp 350.000.000	
5	01	02	2.02	0001	Sub Kegiatan 1: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
					Output: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 231.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	Rp 250.000.000	
5	01	02	2.02	0002	Sub Kegiatan 2: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
					Output: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Kota Bekasi	100 Orang	Rp 58.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Orang	Rp 100.000.000	
5	01	02	2.03		Kegiatan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Output: Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 380.000.000	APBD Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 550.000.000	
					SubKegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
5	01	02	2.03	0003	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			4 Laporan	Rp 380.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Laporan	Rp 550.000.000	
5	01	02	2.04		Kegiatan 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
					Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 20.000.000	APBD Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 350.000.000	
5	01	02	2.04	0003	SubKegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
					Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	Rp 350.000.000	
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Outcome 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen (%)	Kota Bekasi	100,00%	Rp 675.000.000	APBD Kota Bekasi	100,00%	Rp 450.000.000	
5	01	03	2.01		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
					Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 675.000.000	APBD Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 450.000.000	
5	01	03	2.01	0006	Sub Kegiatan1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
					Output: Tersusunnya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Laporan	Rp 150.000.000	
5	01	03	2.01	0008	Sub Kegiatan 2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
					Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 375.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Laporan	Rp 300.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output		Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Outcome 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen (%)	Kota Bekasi	100,00%	Rp 650.000.000	APBD Kota Bekasi	100,00%	Rp 590.000.000	
5	01	03	2.02		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
					Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 650.000.000	APBD Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 590.000.000	
5	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										
					Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Laporan	Rp 140.000.000	
5	01	03	2.02	0004	Sub Kegiatan 2: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian										
					Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Laporan	Rp 450.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output		Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Outcome 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen (%)	Kota Bekasi	100,00%	Rp 675.000.000	APBD Kota Bekasi	100,00%	Rp 1.400.000.000	
5	01	03	2.03		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										
					Output:Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 675.000.000	APBD Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 1.400.000.000	
5	01	03	2.03	0002	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur										
					Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Laporan	Rp 150.000.000	
5	01	03	2.03	0004	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur										
					Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 375.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Laporan	Rp 1.250.000.000	
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota										
					Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1.	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	Kota Bekasi	100%	Rp 102.950.000	APBD Kota Bekasi	100%	Rp 100.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output		Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	01	01	2.01		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
					Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Bekasi	6 Dokumen	Rp 102.950.000	APBD Kota Bekasi	5 Dokumen	Rp 100.000.000	
5	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
					Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Bekasi	3 Dokumen	Rp 52.950.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Dokumen	Rp 50.000.000	
5	01	01	2.01	0006	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
					Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Laporan	Rp 50.000.000	
					Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	Kota Bekasi	92,01%	Rp 22.855.521.386	APBD Kota Bekasi	92,11%	Rp 25.382.132.700	
5	01	01	2.02		Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
					Output 3.2 Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 21.211.551.000	APBD Kota Bekasi	6 Laporan	Rp 23.779.548.700	
5	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Kota Bekasi	2576 Orang/Bulan	Rp 21.196.551.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2856 Orang/Bulan	Rp 23.764.548.700	
5	01	01	2.02	0007	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
					Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Laporan	Rp 15.000.000	
5	01	01	2.08		Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 232.584.000	APBD Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 187.584.000	
5	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
					Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 75.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Laporan	Rp 30.000.000	
5	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	157.584.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	Rp. 157.584.000	APBD Kota Bekasi
5	01	01	2.06		Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Kota Bekasi	29 Laporan	Rp 1.411.386.386	APBD Kota Bekasi	29 Laporan	Rp 1.415.000.000	
5	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Kota Bekasi	7 Paket	Rp 500.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7 Paket	Rp 500.000.000	
5	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Kota Bekasi	2 Paket	Rp 200.518.386	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Paket	Rp 200.000.000	
5	01	01	2.06	0006	Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
					Output:Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	Kota Bekasi	12 Dokumen	Rp 30.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen	Rp 35.000.000	
5	01	01	2.06	0008	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi Kunjungan Tamu									
					Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	Rp 30.000.000	
5	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
					Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	Rp 400.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Laporan	Rp 500.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output		Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	01	01	2.06	0010	Sub Kegiatan 6: Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD										
					Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	Rp 100.000.000	
5	01	01	2.06	0011	Sub Kegiatan 7: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
					Output: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Kota Bekasi	1 Dokumen	Rp 50.868.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
					Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Persen (%)	Kota Bekasi	88,44	Rp 586.500.000	APBD Kota Bekasi	88,46	Rp 297.500.000	
5	01	01	2.05		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
					Output 3.7 Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 586.500.000	APBD Kota Bekasi	2 Laporan	Rp 297.500.000	
5	01	01	2.05	0009	Sub Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
					Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kota Bekasi	70 Orang	Rp 586.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35 Orang	Rp 297.500.000	
					Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	Kota Bekasi	94,77%	Rp 2.192.122.000	APBD Kota Bekasi	94,96%	Rp 1.675.000.000	
5	01	01	2.07		Kegiatan 1: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 600.000.000	APBD Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 500.000.000	
5	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Kota Bekasi	50 Unit	Rp 600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50 Unit	Rp 500.000.000	
5	01	01	2.09		Kegiatan 2: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Laporan	Kota Bekasi	4 Laporan	Rp 1.592.122.000	APBD Kota Bekasi	3 Laporan	Rp 1.175.000.000	
5	01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
					Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kota Bekasi	1 Unit	Rp 50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7 Unit	Rp 450.000.000	
5	01	01	2.09	0002	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan									
					Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kota Bekasi	51 Unit	Rp 550.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45 Unit	Rp 325.000.000	
5	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Kota Bekasi	100 Unit	Rp 100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Unit	Rp 200.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output		Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	01	01	2.09	009	Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					Output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	Kota Bekasi	1 Unit	Rp 892.122.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Unit	Rp 200.000.000	
5	05				Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan										
5	05	03			Program Riset dan Inovasi Daerah										
					Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Persen (%)	Kota Bekasi	82%	Rp 250.000.000	APBD Kota Bekasi	83%	Rp 300.000.000	
5	05	03	2.01		Kegiatan 1: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan										
					Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai NSPK		Indikator: Jumlah Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 250.000.000	APBD Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 300.000.000	
5	05	03	2.01	0003	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan										
					Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	Rp 300.000.000	
						2.	Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	Predikat	Kota Bekasi	2 Predikat	Rp 1.378.944.000	APBD Kota Bekasi	2 Predikat	Rp 1.950.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kegiatan 2: Invensi dan Inovasi									
					Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Invensi dan Inovasi sesuai NSPK	Jumlah Laporan Kegiatan Invensi dan Inovasi sesuai NSPK	Laporan	Kota Bekasi	5 Laporan	Rp 1.378.944.000	APBD Kota Bekasi	7 Laporan	Rp 1.950.000.000	
5	05	03	2.02	0001	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah									
					Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	Rp 300.000.000	
5	05	03	2.02	0008	Sub Kegiatan 3: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi									
					Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 243.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	Rp 450.000.000	
5	05	03	2.02	0010	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat									
					Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 293.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	Rp 400.000.000	
5	05	03	2.02	0012	Sub Kegiatan 5: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi									
					Output: Terlaksananya Fasilitasi dan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Laporan	Kota Bekasi	1 Laporan	Rp 350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	Rp 450.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output		Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi										
5	05	03	2.02	0013	Sub Kegiatan 6: Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah										
					Output: Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah		Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Sistem Informasi	Kota Bekasi	1 Sistem Informasi	Rp 192.944.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Sistem Informasi	Rp 350.000.000	
							TOTAL				Rp 31.403.543.386			Rp 34.794.632.700	

Berdasarkan tabel diatas, program yang akan dilaksanakan Bapperida Kota Bekasi pada tahun 2027 adalah:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam proses pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program ini menghasilkan *output* perencanaan yang dapat diterima secara politis dan ilmiah. Selain itu, program ini juga meliputi pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan pembangunan yang disusun oleh Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
3. Program Riset dan Inovasi Daerah
Program ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, meningkatkan kapasitas SDM/aparatur Bapperida Kota Bekasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas; serta untuk mewujudkan laporan keuangan dan laporan kinerja Bapperida Kota Bekasi yang akuntabel.

Indikator kinerja dari program-program tersebut (*outcome*) tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator Kinerjanya Adalah:
 - a. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran;
 - b. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan;
 - c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah;
 - d. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Indikator kinerjanya adalah:
 Persentase Capaian Kinerja Program
 Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:
- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator kinerjanya antara lain:
- a. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - b. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - c. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
4. Program Riset dan Inovasi Daerah, Indikator kinerjanya antara lain:
- a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

- b. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang Diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan Inovasi dan Inovasi.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana disajikan di atas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 perlu didukung oleh aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adalah ukuran keberhasilan pencapaian Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027.

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(6)
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	22,86
2.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	21,10
3.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	81,50

Sumber: Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Adapun formulasi perhitungan Indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Bekasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.

Formulasi Perhitungan IKU Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN																																										
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN				PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																				
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat. Salah satu komponen evaluasi AKIP adalah Perencanaan Kinerja,	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota yang perhitungannya sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub Komponen</th><th rowspan="2">Nilai Bobot</th></tr><tr><th>Keberadaan</th><th>Kualitas</th><th>Pemanfaatan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table> Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan: a. Keberadaan dokumen perencanaan kinerja telah tersedia (bobot sebesar 6); b. Kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (bobot sebesar 9), yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang <i>smart</i> , menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level	No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25		Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot																																									
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan																																										
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																									
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																									
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																									
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																									

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN																																										
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																							
				yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.	secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>); c. Pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (bobot sebesar 15).																																									
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat. Salah satu komponen evaluasi AKIP adalah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota yang perhitungannya sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub Komponen</th><th rowspan="2">Nilai Bobot</th></tr><tr><th>Keberadaan</th><th>Kualitas</th><th>Pemanfaatan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table> Nilai Komponen Pengukuran Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan: a. Keberadaan pengukuran kinerja telah dilakukan bobot sebesar 6); b. Kualitas dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian	No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25		Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot																																									
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan																																										
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																									
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																									
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																									
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																									

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Pengukuran Kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.	kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan (bobot sebesar 9); c. Pemanfaatan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (bobot sebesar 15).		
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk mengarahkan dan menyinergikan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan	Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi berdasarkan laporan Kepala Daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dimulai dengan perhitungan formulasi sebagai berikut: $SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator ke } i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{35} \text{Skor Indikator ke } i) \text{Inovasi Ke } j}{MAX(10, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$ $\text{Skor Jumlah Inovasi} = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.38, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} \geq 3 \\ 0, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} < 3 \end{cases}$ Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Dokumen Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Dalam Negeri

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN							
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA				
				penetapan kebijakan pembangunan. Pengukuran tingkat inovasi daerah menggunakan Indeks Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.	SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah Penghitungan Indeks Inovasi Daerah: $Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$ Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. Nilai Indeks Inovasi Daerah dinyatakan dalam kategori dengan rentang skor sebagai berikut: <table><tr><td>Kategori</td><td>Rentang Skor</td></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>65,01 - 100,00</td></tr></table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	65,01 - 100,00		
Kategori	Rentang Skor										
Sangat Inovatif	65,01 - 100,00										

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					Inovatif	40,01 – 65,00		
					Kurang Inovatif	0,01 – 40,00		
					Tidak Dapat Dinilai	0		

Sementara itu, realisasi capaian kinerja ketiga IKU tersebut tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi IKU Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA SASARAN TAHUN 2025			KET.
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	22,46	22,28	99,20%	
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	20,70	20,55	99,28%	
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	81,00	94,43	116,58%	

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Perubahan Bapperida Kota Bekasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 22,28 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 22,46. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,20%;

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 20,55 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20,70. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,28%;
3. Indeks Inovasi Daerah, realisasi sebesar 94,43 (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,00. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 116,58%.

5.2. Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Bapperida adalah indikator program yang terdiri dari 10 indikator dengan target sebagai berikut.

Tabel 5.4.

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
1.	Persentase Capaian Kinerja Program	Persen (%)	86,50%
2.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen (%)	100%
3.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen (%)	100%
4.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen (%)	100%
5.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persen (%)	82%
6.	Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	Predikat	2 Predikat
7.	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	100%
8.	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	92,01%

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
9.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,44
10.	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	94,77%

Sementara itu, realisasi capaian kinerja IKK tersebut tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.
Realisasi IKK Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Persentase Capaian Kinerja Program	83,30%	78,79%	94,59%	Belum Tercapai. Jumlah indikator kinerja program yang tercapai dibagi total jumlah indikator kinerja program dikali 100%, maka = $338/429 \times 100\% = 78,79\%$
2.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	Tercapai
3.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	Tercapai
4.	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	Tercapai
5.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	80%	81,25%	101,56%	Tercapai melampaui target. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan sebanyak 26 penelitian dari total 32 penelitian, sehingga $26/32 \times 100\% = 81,25\%$
6.	Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	2 Predikat	5 Predikat	250%	Tercapai melampaui target: 1. Peringkat III Kota Terinovatif IGA 2025 2. Pengirim Inovasi Terbanyak Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 3. Top 18 Kompetisi Inovasi Jawa Barat

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
					Tahun 2025 Inovator Aplikasi BUNG SENJA 4. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi RABU PINTAR 5. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi TESA
7.	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	100%	Tercapai
8.	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	91,81%	92,07%	100,28%	Tercapai
9.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	88,40	88,10	99,66%	Belum Tercapai. Ada efisiensi diklat dan bimtek.
10.	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	94,40%	100%	105,93%	Tercapai

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Bapperida Kota Bekasi untuk waktu 1 (satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan. Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 disusun mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2027, mempedomani Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Bapperida Kota Bekasi memiliki 1 (satu) tujuan yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota" serta memiliki 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan; dan (2) Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapperida Kota Bekasi pada Tahun 2027 Bapperida Kota Bekasi akan melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp31.429.527.386,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 akan dilaksanakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

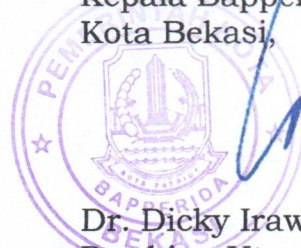
1. Bapperida Kota Bekasi melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027;
2. Bapperida Kota Bekasi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027;

3. Bapperida Kota Bekasi melakukan perubahan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 ini apabila terjadi perubahan kebijakan daerah, provinsi atau nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan selama tahun 2027, atau perubahan ketersediaan anggaran.

Rencana tindak lanjut dari penyusunan Renja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 ini adalah penyusunan RKA Bapperida Kota Bekasi Tahun 2027 yang menjadi dasar penyusunan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2027.

Bekasi, 3 Agustus 2026

Kepala Bapperida
Kota Bekasi,



Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720413 199901 1 002